



IR 101 merupakan sebuah artikel pengetahuan dasar yang ditulis oleh akademisi/mahasiswa Hubungan Internasional dengan tujuan sebagai landasan pengetahuan mendasar bagi para akademisi/mahasiswa Hubungan Internasional. Maka dari itu, artikel ini tidak dapat dijadikan sumber/sitasi dalam keperluan penelitian akademik.

IR 101: ORGANISASI KEAMANAN

International Atomic Energy Agency (IAEA)

Siti Zaimatun Nabila

Pendahuluan

International Atomic Energy Agency atau disingkat IAEA merupakan organisasi keamanan di bidang nuklir, yang dikenal juga melalui istilah “*Atoms for Peace and Development*”. Melalui ini, IAEA menjadi organisasi yang mempromosikan penggunaan teknologi nuklir yang aman dan damai di seluruh dunia.¹

IAEA dibentuk sebagai respon atas ketakutan negara-negara terhadap penemuan dan penggunaan teknologi nuklir secara tidak bertanggung jawab. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, IAEA dibentuk dengan dasar “atom untuk perdamaian” yang diambil dari pidato Presiden Amerika Serikat, Eisenhower, kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 8 Desember 1953. Setelahnya, Statuta IAEA disetujui oleh Presiden Eisenhower beserta 81 negara lainnya dalam *the Conference on the Statute of the International Atomic Energy Agency* yang diadakan di Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang juga

¹ “International Atomic Energy Agency,” 2022, <https://www.iaea.org/>.

menandai kelahiran IAEA sebagai badan tenaga atom internasional pada tanggal 23 Oktober 1956 dan mulai berlaku pada tahun 1957.²

Hingga saat ini, IAEA telah mendirikan kantor pusatnya di Wina, Austria, kantor regional yang berlokasi di Toronto, Kanada dan Tokyo, Jepang, serta kantor penghubung yang berlokasi di New York, Amerika Serikat dan Jenewa, Swiss. IAEA juga memiliki laboratorium khusus dalam teknologi nuklir yang berlokasi di Wina dan Seibersdorf, Austria (sejak 1961). IAEA juga telah dianugerahkan Hadiah Nobel Perdamaian atas kerja kerasnya untuk dunia yang lebih aman dan damai dengan mencegah penggunaan energi nuklir untuk tujuan militer dan memastikan bahwa penggunaan energi nuklir didasari dengan tujuan damai dan digunakan dengan cara yang paling aman.³

Peran IAEA

“The Agency shall seek to accelerate and enlarge the contribution of atomic energy to peace, health, and prosperity throughout the world. It shall ensure, so far as it is able, that assistance provided by it or at its request or under its supervision or control is not used in such a way as to further any military purpose.”

Sesuai dengan bunyi Article II Statuta IAEA tersebut, maka dapat diketahui bahwa berdirinya IAEA ialah dengan penegasan bahwa atom untuk tujuan perdamaian sebagai dasar dari tugas atau peran yang dilakukannya dalam dunia internasional. Sejak disetujuinya, IAEA memiliki mandat untuk dapat bekerja sama dengan negara-negara anggotanya serta berbagai mitra di seluruh dunia untuk mempromosikan teknologi nuklir yang aman, terjamin dan damai, serta diharapkan untuk mampu mengendalikan penggunaannya dengan tepat.⁴

IAEA dalam Perkembangan Nuklir Iran

IAEA sebagai organisasi keamanan internasional memiliki 171 negara sebagai anggotanya, dan Iran merupakan salah satunya. Iran telah tercatat sebagai anggota IAEA sejak tahun 1958, sekaligus meratifikasi *Treaty on The Non Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT) pada tahun 1997, serta mengesahkan Protokol Tambahan untuk *Safeguard Agreement*.

Iran sejak lama diketahui sedang menjalankan program perkembangan nuklir dengan memasukkan aspek militer ke dalamnya, akan tetapi Iran selalu membantah hal tersebut dan mengatakan bahwa perkembangannya adalah untuk

² “International Atomic Energy Agency.”

³ “International Atomic Energy Agency.”

⁴ “International Atomic Energy Agency.”

menambah potensi sumber daya listrik negara. Namun, Iran tidak melaporkan pelaksanaan pengembangan nuklir ini ke IAEA selaku badan atom internasional yang mengendalikan penggunaan nuklir negara-negara. Padahal, Iran selaku negara anggota seharusnya melaporkan tujuan perkembangan nuklir tersebut secara resmi. Hal ini juga berdasarkan pada Article VIII Statuta IAEA yang menyatakan bahwa setiap negara yang meratifikasi Statuta IAEA harus menjalankan kewajibannya sebagai anggota dengan melaporkan setiap kegiatan yang berhubungan dengan atom dan nuklir yang dilakukan oleh negara tersebut.

Kemudian, IAEA pada tahun 2012 menemukan indikasi bahwa Iran sedang melakukan pengayaan Uranium yang merupakan salah satu bahan nuklir tanpa alasan yang jelas dan tidak disampaikan kepada IAEA secara resmi, terbukti dengan hilangnya uranium di situs penelitian mereka sebanyak 19,8 Kg, serta adanya penolakan dari Iran terhadap kedatangan tim ahli IAEA ke pangkalan militer di Parchin, Iran.

Selanjutnya, IAEA terus berupaya untuk mengadakan inspeksi rutin dan meminta Iran untuk terbuka atas pengembangan nuklirnya. IAEA juga terus merilis laporan secara terus-menerus dan kemudian mengeluarkan resolusi berisi pemberitahuan kepada Iran bahwa terdapat krisis kepercayaan terhadap pengembangan yang dilakukan, yang kemudian dibawa ke Dewan Keamanan PBB. DK PBB kemudian mengeluarkan resolusi kepada Iran untuk menegaskan pengembangan nuklirnya semata-mata untuk tujuan damai, serta meminta Iran untuk menangguhkan aktivitas proses ulang dan pengayaan serta riset dan pengembangan untuk diverifikasi oleh IAEA.

Pada akhirnya terbitlah perundingan *Joint Plan of Action* 2013 sebagai solusi menyeluruh tentang persetujuan bersama jangka panjang yang akan memastikan bahwa program nuklir Iran adalah seutuhnya damai, dengan IAEA sebagai pihak yang bertanggung jawab atas langkah verifikasi terkait nuklir. IAEA memiliki hak untuk melakukan pengawasan dan verifikasi dalam perkembangan nuklir Iran.

REFERENSI

“International Atomic Energy Agency,” 2022. <https://www.iaea.org/>.

ORGANIZATION FOR SECURITY AND COOPERATION IN EUROPE (OSCE)

Putri Rahmadani

Pembukaan

Organization for Security and Cooperation in Europe atau disingkat OSCE merupakan organisasi antar pemerintah yang berorientasi keamanan terbesar di dunia, serta menjadi organisasi regional yang berkawasan di daerah Eropa. OSCE membahas semua hal yang berkaitan dengan keamanan termasuk mengendalikan senjata, kegiatan dalam membangun kepercayaan dan keamanan, hak asasi manusia, minoritas nasional, demokratisasi, strategi keamanan, pencegahan terorisme, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Saat ini terdapat 57 negara anggota yang berada dalam OSCE, serta semua negara dalam organisasi memiliki hak yang sama dan keputusan dalam organisasi diterima secara konsensus tapi tidak mengikat secara hukum.⁵

Sejarah dan Peran dari OSCE

Diawali pada tahun 1954, pada pertemuan Menteri Luar Negeri dari empat Kekuatan Besar (AS, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet), Uni Soviet pertama kali mengusulkan untuk mengadakan konferensi tentang keamanan di Eropa. AS dan Sekutunya menolak proposal tersebut, karena ditawarkan sebagai pengganti NATO dan tidak menyediakan partisipasi AS. Namun, dalam iklim politik yang membaik pada akhir 1960-an, negara-negara NATO mulai mempertimbangkan untuk memperluas proses *détente* di Eropa. Setelah beberapa tahun kemudian, syarat utama NATO dalam mengadakan konferensi mengenai keamanan di Eropa sudah terpenuhi dengan adanya penandatanganan perjanjian Quadripartite dari empat Kekuatan Besar.⁶

Pada akhir Musim Dingin tahun 1972 telah dilaksanakan konsultasi awal mengenai Konferensi pertama mengenai keamanan dan kerjasama di Eropa atau dikenal *Conference on Security and Cooperation in Europe* (CSCE) pertemuan tersebut berada pada bulan November 1972. Pada tanggal 8 Juni 1973, merupakan berakhirnya konsultasi dari CSCE dan dari konsultasi tersebut menghasilkan '*Blue Book*' yang diberi nama resmi yaitu "Rekomendasi Akhir dari Konsultasi Helsinki".⁷ Pada awal bulan Juli diadakan pertemuan pertama dari CSCE,

⁵ OSCE, "Who We Are", (2022), <https://www.osce.org/who-we-are> diakses 16 September 2022.

⁶ U.S Mission to the OSCE, "About the OSCE: History", <https://osce.usmission.gov/our-relationship/about-osce/history/>, diakses 16 September 2022.

⁷ OSCE, "What is the OSCE", (2022), <https://www.osce.org/whatistheosce>, diakses 17 September 2022.

menghadirkan para Menteri Luar Negeri dari 33 negara Eropa disertai Amerika Serikat dan Uni Soviet yang dilaksanakan di Helsinki dalam mengadopsi “Rekomendasi Final dari Konsultasi Akhir” (*The ‘Blue Book’*). Selanjutnya, pada tahun 1974 diadakan pertemuan konferensi kedua yang terbagi atas tiga komite dan grup kerjasama berdasarkan 3 (tiga) dimensi: Politik/Militer, Ekonomi dan Lingkungan, dan Kemanusiaan. Pembentukan CSCE ini memberikan kemajuan dalam berbagai permasalahan mengenai keamanan, politik, ekonomi, dan isu-isu lain yang menjadi perhatian bersama. Pada tanggal 30 Juli sampai 1 Agustus 1975 terjadi pertemuan Perdana Menteri dari 35 negara partisipasi CSCE serta penandatanganan “Helsinki *Final Act*” atau Kesepakatan Helsinki (Akta Final Konferensi Keamanan dan Kerjasama di Eropa). Akta ini merupakan sebuah perjanjian yang mengikat secara politik yang terdiri atas tiga bagian utama atau dikenal “keranjang” yang diadopsi berdasarkan konsensus yaitu:

- Keranjang I, Dimensi Keamanan, berisi mengenai Prinsip Panduan Hubungan antara negara peserta termasuk hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Serta dalam membahas langkah-langkah membangun kepercayaan dan aspek-aspek lain dari keamanan dan pelucutan senjata bertujuan dalam meningkatkan transparansi militer.
- Keranjang II, Dimensi Ekonomi, bidang ini berisi tentang kerjasama ekonomi, ilmiah, teknologi dan lingkungan, serta tenaga kerja migran, pelatihan kejuruan dan promosi pariwisata.
- Keranjang III, Dimensi Manusia. Didalam dimensi ini membahas mengenai kerja sama di bidang kemanusiaan dan lainnya: gerakan orang yang lebih bebas; kontak manusia, termasuk reunifikasi keluarga dan kunjungan; kebebasan informasi; dan pertukaran budaya dan pendidikan.

Dari tahun 1975 hingga pada 1990, CSCE berjalan sebagai serangkaian konferensi dan pertemuan bagi para anggotanya dalam membuat komitmen baru serta melakukan negosiasi dan implementasi dari konferensi yang ditinjau secara berkala dalam beberapa peristiwa yang terjadi seperti pertemuan Belgrade, Invasi Uni Soviet ke Afghanistan, Pemboikotan Olimpiade musim panas tahun 1980 oleh AS, Pertemuan Madrid, Perayaan 10 tahun Kesepakatan Helsinki, Nuklir Chernobyl, Pertemuan Vienna, Traktat Angkatan Nuklir Jangka Menengah, Pakta Warsawa, Konferensi pertama tentang dimensi Kemanusiaan di Paris pada tahun Juni 1989, Kejatuhan Tembok Berlin dan bersatunya Jerman. Pertemuan pertama CSCE tentang Dimensi Manusia karena mulai adanya kesadaran mengenai interdependensi antara keamanan dan hak asasi manusia, demokrasi dan supremasi hukum adalah prinsip dasar atas Akta Final Helsinki. Dalam Piagam Paris diadopsi kesimpulan KTT Paris di tahun 1990 yang menunjukkan bahwa terdapat perubahan dalam politik lingkungan telah menciptakan “era baru bagi demokrasi, perdamaian,

dan persatuan” di Eropa serta adanya kerjasama yang dilakukan dan penambahan dokumen dalam Akta Final.

Pada Konferensi di awal 1992, disimpulkan terdapat perkembangan lebih jauh dalam institusi dan struktur dari CSCE serta terdapat penilaian dalam mengadopsi Dokumen Vienna. Kemudian, tidak hanya itu CSCE juga semakin perhatian dalam menilai rekam jejak operasional lembaga yang baru dibangun serta melihat bagaimana meningkatkan efektivitas dan ketajaman dari CSCE. Selama tahun 1992 banyak negara yang ikut berpartisipasi dalam CSCE serta terdapat penandatanganan dalam traktat penerbangan. Pada pertengahan tahun 1992, dilaksanakan pertemuan tahunan pertama dari majelis parlemen CSCE, selanjutnya tahap puncak ketiga CSCE dengan pengadopsian dokumen terakhir oleh 52 negara partisipasi CSCE mengenai tantangan perubahan. Seterusnya CSCE tetap menjalan misi perdamaian, kemanusiaan, demokrasi, dan penyelesaian konflik di beberapa negara seperti Yugoslavia, Skopje, Estonia, Moldova, Latvia, Tajikistan, dan Ukraina.

Pada akhir 1994, dalam Deklarasi KTT Budapest para anggota konferensi bersama-sama sepakat dalam melakukan perubahan nama dari CSCE ke OSCE. Dimana setelah itu, pada bulan Desember 1994 diadakan pertemuan dewan permanen OSCE pertama. Kemudian, negara Hungaria masuk ke dalam OSCE pada tahun 1995 disaat keputusan perubahan dari CSCE menjadi OSCE resmi pada tanggal 1 Januari 1995. Tujuan dari organisasi ini untuk mengatur standar di bidang-bidang keamanan militer, kerjasama ekonomi dan lingkungan, serta hak asasi manusia dan masalah kemanusiaan. Selain itu, OSCE juga berinisiatif dalam bidang diplomasi preventif untuk mencegah, mengelola, serta menyelesaikan konflik didalam dan antara Negara-negara pesertanya. OSCE juga melaksanakan seminar dan pertemuan khusus yang diadakan di berbagai lokasi dan konsultasi secara berkala yang dilaksana oleh Pejabat Tinggi Menteri, dan Kepala Negara atau Pemerintahan.

Saat ini OSCE memiliki 57 negara peserta yang berasal dari Amerika Utara, Eropa, dan Asia yang menjadikan organisasi ini sebagai organisasi keamanan regional terbesar didunia. Selain itu, OSCE juga memiliki mitra kerjasama sebanyak sebelas dimana enam berasal dari Timur Tengah dan Afrika Utara, empat dari Asia, dan Australia.

Tugas dari OSCE

Dalam OSCE terdapat pembagian tiga dimensi keamanan dalam melakukan kegiatan mereka yaitu Politik-Militer, Ekonomi dan Lingkungan, dan Kemanusiaan.

Adapun tugas dari tiap dimensi yang dibagikan tersebut sebagai berikut.⁸

- Dimensi Politik-Militer
 - Pengontrolan Senjata
 - Manajemen Perbatasan
 - Melawan Terorisme
 - Pencegahan dan Penyelesaian Konflik
 - Polisi
 - Reformasi dan Kerjasama dalam Sektor Keamanan

- Dimensi Ekonomi dan Lingkungan
 - Aktivitas Perekonomian
 - Kegiatan Lingkungan
 - Pemerintahan yang Baik

- Dimensi Kemanusiaan
 - Memberantas Perdagangan Manusia
 - Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
 - Demokratisasi
 - Pemilihan
 - Kesetaraan Gender
 - Hak Asasi Manusia
 - Kebebasan dan Pengembangan Media
 - Migrasi
 - Isu-isu Minoritas Nasional
 - Toleransi dan non-diskriminasi
 - Roma dan Sinti
 - Aturan Hukum
 - Pemuda
 - Tercapainya SDGs bersama OSCE

Studi Kasus: Penanganan OSCE pada Konflik di Ukraina Timur Tahun 2014

Dalam kasus ini menjelaskan mengenai Peran dari OSCE pada masa setelah jatuhnya Presiden Ukraina Viktor Yanukovich yang pro-Rusia terjadi konflik bersenjata di Ukraina Timur. Konflik tersebut pecah dikarenakan adanya demonstrasi rakyat secara besar-besaran melawan Presiden Yanukovich yang pro-Rusia dan memilih kerjasama dengan Rusia di bidang ekonomi dimana Rusia akan

⁸ Ibid. OSCE.

melakukan investasi puluhan miliar dollar AS di Ukraina serta menolak kerjasama ekonomi dengan Uni Eropa. Kemudian, setelah Presiden Yanukovich jatuh, maka digantikan oleh Petro yang Pro-Barat dan menunjukkan sikap memihak Uni Eropa dan melarang bahasa Rusia. Terdapat gelombang masyarakat pro-Rusia yang tidak setuju dan bertempat tinggal di wilayah Krimea, Ukraina Timur atau Selatan. Demonstrasi dan aksi protes tersebut berubah menjadi gerakan separatisme pro-Rusia dimulai di wilayah Krimea. Pada masa tersebut, Rusia melakukan aneksasi secara ilegal kepada Krimea yang merupakan wilayah Ukraina dan kini Krimea telah menjadi negara bagian Rusia, namun pihak barat tidak terima dan menganggap ilegal tindakan tersebut walaupun sudah dilakukan referendum oleh Krimea yang didukung Rusia. Pada masa yang sama juga meluasnya konflik bersenjata antara pihak pemerintah dengan pihak pemberontak yang Rusia. Adapun peran yang OSCE berikan dalam merespon krisis yang terjadi di Ukraina sebagai menekankan gagasan *Cooperative Security* (CS) mengenai suatu bentuk kerjasama keamanan antar negara untuk meredakan ketegangan, membangun kepercayaan, meningkatkan prospek pembangunan ekonomi, dan memelihara stabilitas dengan cara mempromosikan dialog dan konsultasi sehingga tercipta keamanan.

Upaya yang OSCE berikan dalam merespon konflik Ukraina yaitu Pertama, OSCE menjadi jembatan dalam meredakan ketegangan kedua negara dengan menyediakan wadah untuk berdialog yang bersifat komprehensif; Kedua, dalam memonitor dinamika krisis di Ukraina Timur secara Intensif maka OSCE mengirimkan Misi Pemantauan Khusus; Ketiga, Melaksanakan Misi Penilaian Hak Minoritas untuk melindungi kaum Minoritas Nasional di Ukraina; Terakhir, OSCE membangun *Inter Parliamentary Liaison Assembly* dari Majelis Dewan untuk menyediakan dialog terbuka dan komprehensif antar negara agar dapat terjadi de-eskalasi konflik. OSCE juga mengadakan pertemuan tiga arah atau disebut dengan Trilateral Contact Group yang terdiri dari perwakilan Ukraina, Rusia, dan Majelis Parlemen OSCE yang dituliskan dalam bentuk Protokol Minsk sebagai bentuk keseriusan dari tiga aktor tersebut dalam menyelesaikan krisis di Ukraina.

Akan tetapi, dalam upaya meredakan konflik di Ukraina tersebut, OSCE masih mendapatkan hambatan di dalam implementasi upayanya tersebut yang disebabkan ketegangan hubungan bilateral antara Ukraina dan Rusia.

REFERENSI

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/28144/3.%20BAB%20II.pdf?sequence=5&isAllowed=y>

Muhammad Dedy Yanuar dan Ali Muhammad. UPAYA ORGANIZATION FOR SECURITY AND CO-OPERATION IN EUROPE DALAM MENANGANI KONFLIK DI UKRAINA TIMUR. *International & Diplomacy*, Vol.3, No.1. (Juli- Desember 2017).
<https://isip.usni.ac.id/jurnal/7%20Muhammad%20Dedy%20Yanuar%20dan%20Ali%20Muhammad.pdf>

<https://www.osce.org/whatistheosce>

U.S Mission to the OSCE, “About the OSCE: History”,
<https://osce.usmission.gov/our-relationship/about-osce/history/>, diakses 16 September 2022.

[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/696190/EPRS_BRI\(2021\)696190_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/696190/EPRS_BRI(2021)696190_EN.pdf)